

**RENCANA KERJA  
DINAS PERHUBUNGAN  
TAHUN 2022**



**PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2021**

**KATA PENGANTAR**

*Bismillahirrahmanirrahim*

*Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan ridho-Nya, dokumen Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2022 telah diselesaikan.

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 ini disusun sebagai implementasi tahapan kegiatan tahunan dari Rencana Strategis (RENSTRA) yang disusun selama lima tahunan, dimana dokumen Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2021 merupakan pedoman/arahan untuk rencana tindak lanjut kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022.

Pada kesempatan ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 dan diharapkan sumbang saran semua pihak untuk penyempurnaan penyusunan dokumen ini di masa mendatang.

Pada akhirnya kami berharap dokumen Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Tahun 2022 ini dapat bermanfaat sebagai panduan serta acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri guna peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

*Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh*

Kediri, - - 2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEDIRI**



**JOKO SUWONO, S.Sos. M. AP**

Pembina Utama Muda

NIP. 19750103 199311 1 001

## DAFTAR ISI

	<b>Hal.</b>
KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
<b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1    Latar Belakang .....	1
1.2    Landasan Hukum.....	2
1.3    Maksud dan Tujuan .....	5
1.4    Sistematika Penyusunan .....	6
<b>BAB II    HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU ..</b>	<b>7</b>
2.1    Evaluasi Pelaksanaan Renja Dishub Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Perhubungan .....	7
2.2    Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan.....	24
2.3    Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan .....	26
2.4    Review terhadap rancangan awal RKPD.....	30
2.5    Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....	39
<b>BAB III    TUJUAN DAN SASARAN DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>40</b>
3.1    Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional .....	40
3.2    Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan .....	42
3.3    Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022.....	43
<b>BAB IV    RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERHUBUNGAN .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB V    PENUTUP .....</b>	<b>54</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Menengah (RPJMD) dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) setiap 1 (satu) tahun.

Rancangan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2022 masuk pada tahap ke 4 RPJPD Kabupaten Kediri tahun 2005 -2025 dengan sasaran pokoknya yaitu pemantapan ketertiban, keamanan dan ketentraman serta terciptanya iklim inovasi daya saing daerah. Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan di bidang perhubungan yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Kediri tahun 2021 – 2026 khususnya serta kebijakan urusan bidang perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri.

Proses penyusunan RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 didasarkan pada forum musyawarah antar bidang sebagai pelaksana yang mengimplementasikan kebijakan dalam bentuk program dan kegiatan yang tercantum pada rencana strategis Dinas Perhubungan Tahun 2021 – 2026. Oleh karena itu, program-program pembangunan di bidang perhubungan dituangkan dalam RENJA Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tahun 2022 yang selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan kebijakan umum di bidang perhubungan, berupa prioritas dan plafon anggaran sementara.

Adapun RENJA tersebut mempunyai fungsi pokok :

1. Sebagai pedoman bagi seluruh pelaksana di bidang perhubungan untuk menyusun program dan kegiatan, karena memuat arah kebijakan pembangunan di bidang perhubungan;
2. Sebagai pedoman dalam menyusun usulan anggaran kegiatan di bidang perhubungan;
3. Menciptakan kepastian kebijakan, karena memuat komitmen Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Pendanaan yang menunjang pelaksanaan setiap program dan kegiatan harus menyesuaikan dengan sumber daya dan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kediri serta mengacu pada prioritas pembangunan daerah. Pelaksanaan setiap program dalam RENJA diselenggarakan berdasarkan pada prinsip-prinsip untuk mewujudkan *Good Governance dan Good Corporate Governance* untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat/ swasta dalam proses dan implementasi kebijakan di bidang perhubungan. Oleh karena itu, Dinas Perhubungan

Kabupaten Kediri perlu menyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2022 guna mendukung pencapaian visi misi Pemerintah Kabupaten Kediri tahun 2022.

## 1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Dinas Perhubungan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Perhubungan, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Perhubungan yaitu:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  11. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
  15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6042);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
22. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 94);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 94);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 133);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
33. Peraturan Bupati Kediri Nomor 30 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2021 Nomor 30).

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud disusunnya RENJA adalah untuk merumuskan rencana kerja Dinas Perhubungan untuk periode 1 (satu) tahun sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Renstra Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan kegiatan serta menetapkan target-target kinerja dan pendanaan indikatif tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang optimal serta sebagai arah dan acuan :

- a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
- b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP/LKPJ);
- c) Untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
- d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
- e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencanaan pelaksanaan dan pengelola perencanaan kegiatan,serta pelaksanaan evaluasi kinerja;
- f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

#### 1.4 Sistematika Penyusunan

Adapun sistematika penulisan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

##### **I. PENDAHULUAN**

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

##### **II. HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU (2020)**

Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan RENJA tahun lalu dan Capaian RENSTRA Dinas, Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, Review terhadap Rancangan Awal RKPD serta Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

##### **III. TUJUAN DAN SASARAN SKPD**

Memuat telaahan terhadap Kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah serta program dan kegiatan.

##### **IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD**

Memuat uraian indikator program/kegiatan dan sumber pendanaan.

##### **V. PENUTUP**

Memuat uraian penutup, berupa:

- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan
- c. Rencana Tindak Lanjut

**BAB II****HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU**

Pelaksanaan evaluasi sebagai salah satu fungsi peningkatan kualitas kinerja instansi pemerintah, oleh karena itu bab ini melaksanakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan tahun 2020 dan perkiraan capaian tahun 2021 dengan mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya kajian tersebut di kaitkan dengan pencapaian target RENSTRA Dinas Perhubungan berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun-tahun sebelumnya. Hasil evaluasi ini digunakan untuk mengetahui:

1. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
2. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RENSTRA perangkat daerah;
3. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu di ambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

**2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan Tahun lalu dan Capaian RENSTRA Dinas Perhubungan**

Pelaksanaan capaian kinerja Tahun 2020 secara umum dapat dilaksanakan dengan baik , hal ini dapat dilihat dari rata-rata capaian kinerja Program dari 9 program sebesar 99,57 % (sangat berhasil), penyerapan anggaran tahun 2020 untuk belanja tidak langsung sebesar 77,87% (berhasil) dan belanja langsung mencapai 99,57 % (sangat berhasil), sedangkan penilaian terhadap tingkat efisiensi capaian kinerja terhadap relaisasi anggaran Tahun 2020 rata-rata sebesar 9,60% (sangat efisien,) sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 tentang rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2020.

Namun demikian ada beberapa hal terkait tupoksi Dinas Perhubungan yang masih perlu mendapatkan prioritas untuk ditingkatkan kinerja antara lain peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) , pelayanan publik, akurasi data base serta kelengkapan sarana dan prasarana sektor perhubungan.

Analisis teknis untuk penyusunan rencana kerja tahun 2022 dapat dilakukan melalui evaluasi hasil pelaksanaan RENJA Dinas Perhubungan tahun 2020 dan pencapaian RENSTRA Dinas Perhubungan sampai dengan Tahun 2021 (perkiraan) yang disajikan dalam tabel 2.1 berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan pencapaian Renstra perangkat Daerah s/d Tahun 2021**  
**Kabupaten Kediri**

**Dinas Perhubungan**

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>Cakupan layanan administrasi perkantoran</b>	%	95,00	83,12	95,00	97,08	102,19	0,00	180,20	1,90
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran rekening (listrik,air, telpon)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Jumlah Pengelola Administrasi Keuangan yang menerima honor	ob	132	132	0	0	-	0	132	1,00
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor yang menerima honor	ob	108	104	0	0	-	0	104	0,96
	Penyediaan alat tulis kantor	Jumlah pengadaan ATK selama 1 tahun	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah barang cetakan dan penggandaan (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah peralatan rumah tangga (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah bahan logistik kantor (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan makanan dan minuman	Jumlah makan dan minum selama 1 tahun	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah SPPD luar daerah (1 thn)	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan jasa pendukung administrasi perkantoran/teknis perkantoran	Jumlah tenaga arsiparis yang menerima honor	ob	12	12	0	0	-	0	12	1,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam daerah	Jumlah SPPD dalam daerah	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan jasa kepegawaian	Jumlah pegawai yang menerima honor	ob	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan jasa operasional	Jumlah tenaga kontrak sekretariat	ob	12	12	0	0	-	0	12	1,00
	Penyediaan jasa administrasi barang	Jumlah pengurus barang yang menerima honor	ob	24	24	0	0	-	0	24	1,00
	Penyediaan jasa keamanan kantor	Jumlah tenaga keamanan yg menerima honor	ob	24	24	0	0	-	0	24	1,00
	Pelaksanaan Administrasi Perkantoran	Jumlah pemenuhan kebutuhan pelaksanaan adminitrasi kantor	Bulan	0	12	12	12	100,00	0	24	#DIV/0!
		Jumlah dokumen administrasi perkantoran	Dokumen	0	37	5	5	100,00	0	42	#DIV/0!
	Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi kelembagaan	kegiatan	0	259	50	40	80,00	0	299	#DIV/0!
	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>Cakupan layanan sarana dan prasarana aparatur</b>	%	<b>95,00</b>	<b>79,09</b>	<b>95,00</b>	<b>98,46</b>	<b>103,64</b>	<b>0,00</b>	<b>177,55</b>	<b>1,87</b>
	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor	paket	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara	gedung	1	16	0	0	-	0	16	1600,00
	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	kendaraan	1	27	0	0	-	0	27	2700,00
	Pemeliharaan rutin/berkala mebelair	Jumlah mebelair yang dipelihara	paket	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	paket	1	1	0	0	-	0	1	100,00
	Rehabilitasi sedang berat gedung kantor	Jumlah gedung kantor yang direhap	paket	1	2	0	0	-	0	2	200,00
	Rehabilitasi sedang berat kendaraan dinas/operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang direhap	paket	1	1	0	0	-	0	1	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyediaan/Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Sarana Prasarana Kantor/Aparatur	Jumlah penyediaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	-	0	1	0	0	-	0	1	#DIV/0!
		Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan sarana prasarana kantor/aparatur	-	0	29	28	24	85,71	0	53	#DIV/0!
	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>Persentase kedisiplinan aparatur yang bertugas</b>	<b>%</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>96</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Pengadaan pakaian kerja lapangan	Jumlah pakaian kerja lapangan	buah	120	70	0	0	-	0	0	0,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah pendidikan dan pelatihan formal	kali keg.	1	1	0	0	-	0	0	0,00
	Pendidikan dan pelatihan formal	Jumlah peserta pelatihan	orang	0	175	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>Prosentase peningkatan disiplin dan kinerja sumber daya aparatur</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>6,77</b>	<b>80</b>	<b>100</b>	<b>125</b>	<b>0</b>	<b>106,77</b>	<b>1,33</b>
	Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelatihan sumber daya aparatur	kali kegiatan	1	18	2	2	100,00	0	20	2000,00
	<b>Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>Tingkat ketepatan waktu pelaporan capaian kinerja dan keuangan</b>	<b>%</b>	<b>95,00</b>	<b>53,57</b>	<b>95,00</b>	<b>100</b>	<b>105,26</b>	<b>0,00</b>	<b>153,57</b>	<b>1,62</b>
	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	buku	6	6	-	0	-	0	6	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	Jumlah dokumen laporan	buku	8	8	-	0	-	0	8	100,00
	Penyusunan pelaporan prognosis realisasi anggaran	Jumlah dokumen laporan	buku	8	8	-	0	-	0	8	100,00
	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	Jumlah dokumen laporan	buku	10	10	-	0	-	0	10	100,00
	Penyusunan laporan neraca Perangkat Daerah akhir tahun	Jumlah dokumen laporan	buku	10	10	-	0	-	0	10	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyusunan Lakip	Jumlah dokumen laporan	buku	5	5	-	0	-	0	5	100,00
	Penyusunan pelaporan rencana kerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	buku	6	6	-	0	-	0	6	100,00
	Penyusunan pelaporan keuangan bulanan	Jumlah dokumen laporan	buku	12	12	-	0	-	0	12	100,00
	Penyusunan pelaporan survey ikm di bidang perhubungan	Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	point	76	74	-	0	-	0	74	97,37
	Penyusunan rencana strategis dan/atau LKPJ SKPD	Jumlah dokumen renstra	buku	0	5	-	0	-	0	5	#DIV/0!
	Penyusunan profil bidang perhubungan	Jumlah Profil yang disusun	dok	0	0	-	0	-	0	0	#DIV/0!
	Penataan dan pengelolaan data kearsipan	Jumlah aplikasi yang diadakan	paket	0	1	-	0	-	0	1	#DIV/0!
	Pengembangan Sistem dan Layanan Informasi Terpadu	Jumlah sistem yang diadakan	paket	5	1	-	0	-	0	1	20,00
	Penyusunan Standar operasional prosedur	Jumlah dokumen SOP yang direview	dokumen	0	0	-	0	-	0	0	#DIV/0!
	Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Sekretariat	Jumlah kegiatan moniev	paket	1	0	-	0	-	0	0	0,00
	Penyusunan Pelaporan Dokumen Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan SKPD	dokumen	0	10	2	10	500,00	0	20	#DIV/0!
	<b>Program fasilitas peningkatan dan pemeliharaan kesehatan aparatur</b>	<b>Persentase pelaksanaan kegiatan peningkatan kesehatan aparatur</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>111,8</b>	<b>90</b>	<b>89,47</b>	<b>99,41</b>	<b>0,00</b>	<b>201,27</b>	<b>2,24</b>
	Pembinaan Olahraga Aparatur	Jumlah pelaksanaan kegiatan senam kesehatan	kali keg	70	39	0	0	-	0	39	55,71
	<b>Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan</b>	<b>Persentase pemenuhan kebutuhan prasarana dan fasilitas perhubungan</b>	<b>%</b>	<b>95</b>	<b>25,86</b>	<b>95</b>	<b>98,95</b>	<b>104,16</b>	<b>0,00</b>	<b>124,81</b>	<b>1,31</b>
	Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan	Jumlah koordinasi bidang lalu lintas dan angkutan	kali/tahun	6	12	0	0	-	0	12	200,00
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah jenis sasaran monev	jenis keg	0	2	0	0	-	0	2	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyusunan tataran transportasi lokal	Jumlah dokumen tatralok yang disusun	dok	0	0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Peningkatan Pengembangan Potensi Dan Peran Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan survey dan evaluasi kinerja jalan di Kab. Kediri	-	0	5	3	5	166,67	0	10	#DIV/0!
	Pengadaan Perlengkapan Jalan	Jumlah pengadaan perlengkapan jalan	-	0	103	52	52	100,00	0	155	#DIV/0!
	Penyelenggaraan ANDA LALIN	Jumlah rekomendasi andalalin	-	0	6	0	0		0	6	#DIV/0!
	Forum Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah kegiatan forum lalu lintas dan angkutan jalan	-	0	2	0	0		0	2	#DIV/0!
	<b>Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ</b>	<b>Persentase terpenuhinya sarana dan prasarana uji kir kendaraan bermotor</b>	<b>%</b>	<b>90</b>	<b>66,02</b>	<b>90,00</b>	<b>99,88</b>	<b>110,98</b>	<b>0,00</b>	<b>165,9</b>	<b>1,84</b>
	Pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat PKB yang dikalibrasi	unit	11	10	0	0	-	0	10	90,91
	Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan yang direhab	lokasi	1	1	0	0	-	0	1	100,00
	Pemeliharaan terminal/pelabuhan	Jumlah terminal/pelabuhan yang dipelihara	lokasi	1	2	0	0	-	0	2	200,00
	Pemeliharaan halte	Jumlah halte yang dipelihara	lokasi	3	6	0	0	-	0	6	200,00
	Penataan alat pengujian kendaraan bermotor	Jumlah alat PKB yang ditata	unit	11	0	0	0	-	0	0	0,00
	Rehabilitasi sedang berat gedung pengujian kendaraan bermotor	Jumlah lokasi PKB yang direhab	lokasi	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Rehabilitasi/Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah perlengkapan jalan yang direhab/dipelihara	-	0	35	28	24	85,71	0	59	#DIV/0!
	<b>Pembangunan Sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>% pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perhubungan</b>	<b>%</b>	<b>85</b>	<b>46,40</b>	<b>85,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46,4</b>	<b>0,55</b>
	Perkerasan fasilitas parkir	Jumlah fasilitas perparkiran yg di rehab	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Rehabilitasi gedung dan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah gedung yang direhab	ged	1	1	0	0	-	0	1	100,00

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Pengadaan sarana prasarana penyebrangan.	Jumlah sarpras penyebrangan yang di adakan (pelampung / alat keselamatan)	bh	75	0	0	0	-	0	0	0,00
	<b>Pogram peningkatan pelayanan angkutan</b>	<b>Persentase rasio angkutan darat dibanding penumpang</b>	%	<b>85</b>	<b>65,17</b>	<b>85</b>	<b>94,4</b>	<b>111,06</b>	<b>0,00</b>	<b>159,57</b>	<b>1,88</b>
	Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum di jalan raya	Jumlah angkutan umum yang terjaring	buah	360	0	0	0	-	0	0	0,00
	Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang di lingkungan terminal	Jumlah operasi angkutan umum di terminal	kegiatan	2	3	0	0	-	0	3	150,00
	Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan	Jumlah peserta sosialisasi	orang	100	50	0	0	-	0	50	50,00
	Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraan angkutan umum teladan	Jumlah sopir/juru mudi/awak AKUT yang ikut pelatihan	orang	75	50	0	0	-	0	50	66,67
	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Jumlah dokumen pelaporan moniev	buku	2	0	0	0	-	0	0	0,00
	Operasional penertiban lalu lintas & angkutan jalan	Jumlah operasi penertiban selama 1 than	Bulan	12	7	0	0	-	0	7	58,33
	Pos komando taktis	Jumlah jenis kegiatan poskotis	jenis kegiatan	15	8	0	0	-	0	8	53,33
	Pembinaan dan penyusunan kontrak juru parkir	Jumlah jukir yang dibina dan menandatangani kontrak	orang	117	203	0	0	-	0	203	173,50
	Kampanye bebas polusi langit biru	Jumlah kendaraan yang mengikuti langit biru	kendaraan	100	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemilihan dan pemberian penghargaan wajib retribusi parkir berlangganan	Jumlah penerima hadiah	org	0	8	0	0	-	0	8	#DIV/0!
	Pelaksanaan hari Bebas Asap Kendaraan Bermotor	Jumlah peserta sosialisasi	org/keg	300	483	0	0	-	0	483	161,00
	Pengembangan dan peningkatan Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan pengembangan dan peningkatan PKB	keg.	0	6	0	0	-	0	6	#DIV/0!

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Pengawasan dan penertiban bus dan MPU di terminal	jumlah Bus dan MPU yang diawasi	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Penyelenggaraan lokasi peristirahatan mudik lebaran (Rest Area)	jumlah pemudik yang singah di rest area	org	100	0	0	0	-	0	0	0,00
	peningkatan Pelayanan angkutan	jumlah peserta kegiatan	org	10	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan perlengkapan dan operasional kendaraan derek	Jumlah perlengkapan kendaraan derek yang diadakan	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengawasan angkutan penyeberangan di air	Jumlah kegiatan pengawasan	keg	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	pemeliharaan sarana penyeberangan air	Jumlah sarana yang dipelihara	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pendataan dan penyuluhan kendaraan umum tidak dalam trayek	Jumlah kendaraan yang terdata	pkt	0	0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Pengadaan perahu penyeberangan	Jumlah perahu yang diadakan (Kras)	unit	0	0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Seminar Rencana Aksi Daerah penurunan emisi gas rumah kaca bidang transportasi	Jumlah peserta seminar	org	30	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengembangan fasilitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor	Jumlah fasilitas pelayanan PKB yang dikembangkan	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Peningkatan pemahaman tertib lalu lintas bagi pelajar.	Jumlah peserta	org	50	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengawasan angkutan orang/barang	Jumlah angkutan yang di awasi	unit	50	100	0	0	-	0	100	200,00
	Kajian Angkutan Pariwisata	Jumlah dokumen kajian	unit	0	1	0	0	-	0	1	#DIV/0!
	Kajian Angkutan Barang	Jumlah dokumen kajian	unit	0	1	0	0	-	0	1	#DIV/0!
	Pengawasan dan Pengendalian perparkiran	Jumlah Pengawasan dan Pengendalian perparkiran	Hr/Org	0	24	0	0	-	0	24	#DIV/0!
	Pemilihan juru parkir teladan	Jumlah peserta juru parkir teladan	org/bln	0	117	0	0	-	0	117	#DIV/0!
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan terminal	Jumlah Pengadaan peralatan dan perlengkapan terminal	org/bln	0	14	0	0	-	0	14	#DIV/0!
	Kajian Angkutan Orang	Jumlah dokumen kajian	Hr/Org	0	14	0	0	-	0	14	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan PKB	Jumlah pengadaan perangkat untuk pelayanan PKB	unit	0	66309	3	3	100,00	-	66.312	#DIV/0!
		Jumlah Pemeliharaan sarana dan prasarana PKB yang dipelihara/direhab	unit	0	11	9	9	100,00	0	20	#DIV/0!
	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan Orang	Jumlah sarana dan prasarana penyeberangan air yang dipelihara	unit	0	2	0	0	0,00	0	2	#DIV/0!
		Jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring pelayanan angkutan orang	kali kegiatan	0	0	15	8	53,33	0	8	#DIV/0!
		Jumlah pengadaan karcis penyeberangan air	bendel	0	0	940	940	100,00	0	940	#DIV/0!
	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan Angkutan Barang dan Khusus	Jumlah kegiatan koordinasi, pengawasan dan monitoring pelayanan angkutan barang dan khusus	kali kegiatan	0	0	20	20	100,00	0	20	#DIV/0!
	<b>Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas</b>	<b>Persentase ketersediaan sarana dan prasarana lalu lintas</b>	%	<b>85</b>	<b>82,99</b>	<b>85,00</b>	<b>97,12</b>	<b>114,26</b>	<b>85,00</b>	<b>265,11</b>	<b>3,12</b>
	Pengadaan rambu-rambu lalu lintas	Jumlah rambu-rambu lalu lintas	unit	664	74	0	0	-	0	74	11,14
	Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan	Jumlah pemeliharaan guardrail selama 1 thn	bln	0	12	0	0	-	0	12	#DIV/0!
	Pengadaan Guardrail	Jumlah Guardrail yang diadakan	beam	30	4	0	0	-	0	4	13,33
	Pengadaan APILL	Jumlah APILL yang diadakan	unit	6	83	0	0	-	0	83	1383,33
	Pemeliharaan Apill	Jumlah APILL yang dipelihara	unit	26	4	0	0	-	0	4	15,38
		Jumlah tenaga teknis pemeliharaan APILL dalam 1 thn	ok	77	288	0	0	-	0	288	374,03
	Pemeliharaan Rambu	Jumlah rambu yang dipelihara dalam 1 thn	unit	130	30	0	0	-	0	30	23,08
	Patroli dan pengaturan lalu lintas	Jumlah patwal dalam 1 tahun	Kali/thn	10	5	0	0	-	0	5	50,00
	Pengadaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	Jumlah RPPJ yang diadakan	unit	25	31	0	0	-	0	31	124,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Pengembangan dan Peningkatan Pelayanan PKB	Jumlah pengadaan perangkat untuk pelayanan PKB	unit	0	66309	3	3	100,00	-	66.312	#DIV/0!
	Pengadaan Cermin Tikungan	Jumlah cermin tikungan yang diadakan	unit	0	25	0	0	-	0	25	#DIV/0!
	Pengadaan dan Pemasangan Moving Sign Display MSD	Jumlah MSD yang diadakan	unit	5	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengecatan marka jalan	Jumlah (M') pengecatan marka jalan	m'	5455	3219	0	0	-	0	3.219	59,01
	Monitoring dan evaluasi sarana dan prasarana lalu lintas	Jumlah lokasi yang di monev	kec	5	21	0	0	-	0	21	420,00
	Traffic Cone	Jumlah traffic cone yang diadakan	unit	100	0	0	0	-	0	0	0,00
	Kampanye keselamatan lalu lintas angkutan jalan	Jumlah peserta kampanye	org	25	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pekan budaya tertib lalu lintas angkutan jalan	Jumlah pengunjung stand pekan budaya	orang	350	700	0	0	-	0	700	200,00
	Pengadaan Deliniator	Jumlah delinitor yang diadakan	unit	306	265	0	0	-	0	265	86,60
	Pengadaan dan Pemasangan Paku Jalan	Jumlah pemasangan paku jalan	unit	112	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan dan Pemasangan Running Text	Jumlah Running Text yang diadakan	unit	4	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan Road Barrier	Jumlah Road Barrier yang diadakan	unit	100	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan dan Pemasangan Lampu Penerang Jalan Umum Lalu Lintas	Jumlah LPJU yang diadakan	unit	10	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan Meteranisasi	Jumlah meteranisasi yang diadakan	unit	0	0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Koordinasi dalam peningkatan pelayanan Lalu Lintas	Dokumen hasil kegiatan koordinasi	dok	0	5	0	0	-	0	5	#DIV/0!
	Pemeliharaan RPPJ	Jumlah RPPJ yang dipelihara dalam 1 thn	unit	45	4	0	0	-	0	4	8,89
	Pemeliharaan Cermin Tikungan	jumlah cermin tikungan yang dipelihara	unit	18	18	0	0	-	0	18	100,00
	Pemeliharaan MSD	jumlah MSD yang diadakan	unit	28	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan deliniator	jumlah delinitor yang dipelihara	unit	150	140	0	0	-	0	140	93,33
	Kajian manajemen dan rekayasa lalin	jumlah dokumen kajian man.rekayasa	dok	0	5	0	0	-	0	5	#DIV/0!
	Penyusunan Master plan transportasi	jumlah dokumen masterplan yang diadakan	dok	0	3	0	0	-	0	3	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyediaan Jasa Listrik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Jumlah pembayaran listrik selama 1 tahun	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	100,00
	Pengadaan fasilitas zona selamat sekolah	Jumlah lokasi pemasangan ZOSS	lokasi	2	6	0	0	-	0	6	300,00
	Pengadaan Kendaraan Sky Lift	Jumlah kendaraan yang diadakan	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pengadaan peralatan dan perlengkapan ATCS	Jumlah ATCS yang diadakan	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Operasional ATCS	Jumlah ATCS yang Oprasionalkan	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Operasional Kendaraan Sky Lift	Jumlah kendaraan yang Operasionalkan	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan Running text	Jumlah pemeliharaan Running Text	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan ATCS	Jumlah pemeliharaan ATCS	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan LPJU	Jumlah pemeliharaan LPJU	unit	13	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan Tower	jumlah pemeliharaan Tower	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Pemeliharaan Kendaraan Sky Lift	jumlah pemeliharaanKendaraan Sky Lift	unit	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Operasional Penertipan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Jumlah Kegiatan Penertiban Angkutan Jalan dan Pengalihan arus Lalu Lintas	kali kegiatan	0	42	10	10	100,00	0	52	#DIV/0!
	Peningkatan Dan Pengembangan Pelayanan Perparkiran	Jumlah pengadaan karcis retribusi parkir di tepi jalan umum	lembar	0	590806	0	0	-	-	590.806	#DIV/0!
		Jumlah kegiatan monev jukir	kali keg	0	0	4	4	100,00	0	4	#DIV/0!
	Pekan Keselamatan Lalu Lintas Angkutan Jalan	Jumlah peserta sosialisasi pekan keselamatan lalu lintas angkutan jalan	peserta	0	500	0	0	-	0	500	#DIV/0!
	<b>Program Pengelolaan dan pengembangan kinerja sektor perhubungan</b>	<b>Persentase pemenuhan alat kelaikan kendaraan bermotor</b>	<b>%</b>	<b>90,00</b>	<b>88,92</b>	<b>90,00</b>	<b>99,65</b>	<b>110,72</b>	<b>0,00</b>	<b>188,57</b>	<b>2,10</b>
	Pengadaan tanda bukti retribusi parkir	Jumlah karcis parkir	lembar	27500	28000	0	-	-	0	28.000	101,82

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyediaan Jasa Listrik Sarana dan Prasarana Lalu Lintas	Jumlah pembayaran listrik selama 1 tahun	Bulan	12	12	0	0	-	0	12	100,00
	Pengadaan buku uji dan kelengkapan uji kendaraan bermotor	Jumlah pengadaan buku uji dan plat uji	buah/plat	12000 /15000	16000 / 48500	0,00	0	-	0	34000/106900	283,33/712,67
	Penyediaan dan pengembangan database sektor perhubungan	Jumlah aplikasi	paket	0	0	0,00	0	-	0	106.900	#DIV/0!
	Penyediaan jasa operasional juru parkir	Jumlah jukir yang menerima HR	orang	120	115	0	0	-	0	115	95,83
	Validasi Data Perhubungan Wahana Tata Nugraha	Jumlah dokumen pelaporan	dok		0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Penyusunan ANDAL LALIN	Jumlah dokumen	dok	3	5	0	0	-	0	5	166,67
	Pengadaan dan Pemasangan Tower	Jumlah Tower yang diadakan	unit		3	0	0	-	0	3	#DIV/0!
	Pengadaan tanda bukti retribusi penyeberangan air	Jumlah karcis penyeberangan air	bendel	3000	2000	0	-	-	0	2.000	66,67
	Penyusunan laporan standar Pelayanan minimal bidang perhubungan	Jumlah dokumen laporan	buah		0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	Operasional Wahana Tata Nugraha	Jumlah jenis penghargaan yang didapatkan	kegiatan	1	1	0	0	-	0	1	100,00
	Penyediaan Jasa Operasional Bidang Angkutan	Jumlah tenaga kerja bidang angkutan	ob	16	143	0	0	-	0	143	893,75
	Penyediaan Jasa Operasional Jasa Lalin	Jumlah tenaga kerja bidang lalin	ob	5	65	0	0	-	0	65	1300,00
	Penyediaan Jasa Operasional Bidang DALOP	Jumlah tenaga kerja bidang dalop	ob	20	208	0	0	-	0	208	1040,00
	Penyediaan Jasa Operasional bidang Pengembangan	Jumlah tenaga kerja bidang pengembangan	ob	2	26	0	0	-	0	26	1300,00
	Pengadaan Pakaian Kerja Jukir	Jumlah pengadaan pakaian kerja jukir	orang	130	117	0	0	-	0	117	90,00
	Monitoring dan evaluasi data perhubungan	Jumlah data yang di moniev.	pkt	1	1	0	0	-	0	1	100,00
	Perencanaan Penyusunan DED pembangunan ATCS.	Jumlah dokumen DED	dok	0	5	0	0	-	0	5	#DIV/0!
	Kajian Pengembangan Intellegent Transport System	Jumlah dokumen kajian	dok	0	5	0	0	-	0	5	#DIV/0!
	ISO PKB	Jumlah ISO	pkt	1	0	0	0	-	0	0	0,00

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyusunan Kajian Pengembangan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan	Jumlah dokumen Pengembangan Pelayanan Publik Bidang Perhubungan	dokumen	0	1	0	0		0	1	#DIV/0!
	Monitoring ,Evaluasi dan pelaporan data pengembangan Perhubungan	Jumlah kegiatan survey data pengembangan Perhubungan	kali keg	0	2	2	3	150,00	0	5	#DIV/0!
	Peningkatan dan Pengelolaan Sistem Informasi Perhubungan	Jumlah sistem informasi perhubungan yang dikembangkan	sistem	0	3	1	1	100,00	0	4	#DIV/0!
	<b>Program pembangunan sistem informasi bidang perhubungan</b>	<b>Persentase pelaksanaan fungsi sistem informasi bidang perhubungan</b>	<b>%</b>	<b>85,00</b>	<b>78,72</b>	<b>85,00</b>	<b>98,65</b>	<b>116,06</b>	<b>0,00</b>	<b>177,37</b>	<b>2,09</b>
	Pemeliharaan sistem informasi budang perhubungan	Jumlah sistem informasi yang dipelihara	sistem	1	1	0	0	-	0	1	100,00
	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Perhubungan	Jumlah operator yang menerima HR	orang	5	6	0	0	-	0	6	120,00
	Pemeliharaan sarana dan prasarana sistem informasi bidang perhubungan	Jumlah sarpras SIM yang dipelihara	paket	1	0	0	0	-	0	0	0,00
	Penyusunan Sistem Informasi Manajemen Pengujian Kendaraan Bermotor	Jumlah SIM PKB	sistem	0	1	0	0	-	0	1	#DIV/0!
	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pemenuhan kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>#DIV/0!</b>
	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pelaporan kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>95</b>	<b>95</b>	<b>#DIV/0!</b>
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	dokumen	3	0	0	0	-	3	3	#DIV/0!
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen laporan	dokumen	7	0	0	0	-	3	3	#DIV/0!
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prosentase Kegiatan pelaporan administrasi keuangan perangkat daerah	%	100	0	0	0	-	100	100	#DIV/0!

No	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemberian gaji dan tunjangan penghasilan PNS	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah bulan pembayaran honor petugas keuangan dan pegawai kontrak	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	8	0	0	0	-	8	8	#DIV/0!
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan	dokumen	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Kegiatan pelaporan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	%	0	0	0	0	-	<b>100</b>	100	#DIV/0!
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah bulan pembayaran jasa pengurus/penyimpan BMD	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	%	100	0	0	0	-	<b>95</b>	95	#DIV/0!
	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor (1 tahun)	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (1 tahun)	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah penyediaan peralatan rumah tangga (1 thn)	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan bahan logistik kantor (1 tahun)	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan (1 tahun)	jenis bulan	9	0	0	0	-	9	9	#DIV/0!
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		9 = (8/7)	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah pemenuhan bahan material PKB (1 thn)	Bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah perjalanan dinas dan kegiatan mamin	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah bulan pembayaran jasa tenaga kearsipan	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	0	0	0	-	<b>95</b>	95	#DIV/0!
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah bulan pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	bulan	12	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!
	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	%	100	0	0	0	-	<b>95</b>	95	#DIV/0!
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	unit	29	0	0	0	-	28	28	#DIV/0!
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	unit	65	0	0	0	-	6	6	#DIV/0!
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	paket	2	0	0	0	-	1	1	#DIV/0!
	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Prosentase Penyelenggaraan lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	%	95	0	0	0	-	<b>95</b>	95	#DIV/0!
	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pemenuhan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	%	95	0	0	0	-	<b>95</b>	95	#DIV/0!
	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Unit	59	0	0	0	-	29	29	#DIV/0!
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	unit	49	0	0	0	-	59	59	#DIV/0!
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Prosentase Kegiatan Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas</b>	%	<b>95</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-	<b>95</b>	<b>95</b>	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan peningkatan dan pengembangan pelayanan perparkiran	keg	4	0	0	0	-	4	4	DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Prosentase Pemenuhuna Kabutuhan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	%	100	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan perangkat untuk pelayanan PKB	unit	3	0	0	0	-	3	3	#DIV/0!
	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah pengadaan perangkat untuk pelayanan PKB	set	18750	0	0	0	-	3	3	#DIV/0!
	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	unit	12	0	0	0	-	9	9	#DIV/0!
	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan survey data pengembangan Perhubungan Jumlah kegiatan pengembangan Pelayanan Jumlah Sistem informasi perhubungan yang dikembangkan	kali kegiatan kali kegiatan sistem	2	0	0	0	-	2 2 1	2 2 1	#DIV/0!
	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	%	100	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan manajemen dan rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Provinsi	kali kegiatan	5	0	0	0	-	4	4	#DIV/0!
	Pengawasan dan Pengendalian Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Penertiban Angkutan Jalan dan Pengendalian Lalu Lintas									
	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah pelaksanaan kegiatan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	kali	5	0	0	0	-	5	5	#DIV/0!

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Satuan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2020)			Target Program / Kegiatan Renja SKPD 2021 (Permen 90 Th 2019)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s/d Tahun Berjalan	
						Target Renja Perangkat Daerah	Realisasi Renja Perangkat Daerah	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9 = (8/7)	10	11 = (6+8+10)	12 = (11/5)
	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	%	100	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	kegiatan	5	0	0	0	-	2	2	#DIV/0!
	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Prosentase Pelaksanaan kegiatan penertiban &amp; Pengendalian Lalu Lintas</b>	%	100	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	kali kegiatan	15	0	0	0	-	0	0	#DIV/0!
	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Kebutuhan Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	100	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah pengadaan/pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan angkutan	Unit	0	0	0	0	-	1	1	#DIV/0!
		Jumlah kegiatan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan angkutan orang dan barang	kali kegiatan	45							
	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	%	0	0	0	0	-	95	95	#DIV/0!
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi pengawasan dan monitoring pelayanan angkutan barang	kali kegiatan	0	0	0	0	-	12	12	#DIV/0!

## 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi bidang perhubungan berupaya untuk selalu bersikap dan bertindak proaktif, kreatif, inovatif serta profesional sesuai dengan tanggung jawab dan kewenangan pelayanan publik bidang perhubungan. Disamping sebagai dinas teknis bidang perhubungan, Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri juga diberi tanggung jawab sebagai salah satu dinas penghasil untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berupa retribusi parkir di tepi jalan umum, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi terminal, retribusi ijin trayek dan retribusi penyeberangan orang (penyebrangan sungai).

Berdasarkan hal tersebut, maka gambaran analisis kinerja pelayanan Dinas Perhubungan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama (IKU) serta menyesuaikan kondisi setiap tahun, dapat dijelaskan sebagaimana rincian dalam tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri**  
**Tahun 2019 – Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	-	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Transportasi	76,00	76,50	77,00	77,50	82,01	83,73	83	83	
2	% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	-	% angkutan barang bermuatan yang tidak melanggar aturan tonase, dimensi, dan laik jalan kendaraan	86,46	86,67	87,50	88,00	88,50	86	90	90	
3	% Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (Uji KIR)	-	% Angkutan jalan yang memenuhi standar keselamatan (Uji KIR)	87,86	91,29	94,00	96,00	98,95	96,74	98	98	
4	Rata-rata prosentase perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan	-	Rata-rata prosentase perlengkapan jalan terpasang dibanding jumlah kebutuhan	74,93	76,21	77,00	78,00	99,4	106,12	90	90	

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan jika dilihat Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri sebagai dinas penghasil maka dapat digambarkan capaian kinerja pemenuhan Pendapatan Asli Daerah bidang perhubungan tahun 2020 sebagai berikut:

**Tabel 2.3**  
**Capaian PAD Dinas Perhubungan Tahun 2020**

KODE REKENING	URAIAN	TARGET	REALISASI	Capaian Kinerja	
				(Rp)	(%)
1	2	3	4	5	6
4	PENDAPATAN	11.077.645.650	12.022.783.650	945.138.000	108,53
4 1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	11.077.645.650	12.022.783.650	945.138.000	108,53
4 1 2	Hasil Retribusi Daerah	11.077.645.650	12.022.783.650	945.138.000	108,53
4 1 2 01	Retribusi Jasa Umum	11.031.135.000	11.975.878.000	944.743.000	108,56
4 1 2 01 19	Retribusi Pelayanan Parkir di tepi jalan umum	9.795.786.000	10.548.390.000	752.604.000	107,68
4 1 2 01 45	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	1.235.349.000	1.427.488.000	192.139.000	115,55
4 1 2 02	Retribusi Jasa Usaha	46.405.650	46.905.650	500.000	101,08
4 1 2 02 01	Retribusi pemakaian kekayaan daerah penyewaan tanah dan bangunan	3.832.500	3.832.500	0	100,00
4 1 2 02 14	Retribusi terminal tempat kegiatan usaha	35.062.500	35.562.500	500.000	101,43
4 1 2 02 24	Retribusi Penyeberangan orang	7.510.650	7.510.650	0	100,00
4 1 2 03	Retribusi Perizinan tertentu	105.000	0	(105.000)	0
4 1 2 03 13	Retribusi Izin trayek	105.000	0	(105.000)	0

Hasil pencapaian pendapatan Dinas Perhubungan pada tahun 2020 menunjukkan angka yang positif, dari target yang ditetapkan sebesar Rp. 11.077.645.650 yang telah direalisasikan bisa mencapai Rp. 12.022.783.650 atau 108,53 % target telah tercapai. Hal ini menunjukkan kinerja pencapaian pendapatan yang baik pada Dinas Perhubungan .

### 2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan

Dalam catatan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) terdapat lima masalah besar yang tengah melilit sektor transportasi darat di Indonesia saat ini, yaitu:

- Pengelolaan transportasi darat belum efisien dan efektif terutama di daerah tertinggal, terluar dan terdalam (3T);
- Kurangnya rasa kebersamaan dalam penggunaan transportasi darat seperti egois pengemudi yang kerap terjadi di jalan raya;
- Masih mengabaikan aspek keselamatan yang berpotensi mengakibatkan kecelakaan lalu lintas (laka lantas);
- Angkutan massal yang belum merata terutama di wilayah kepulauan;
- Tingginya penggunaan kendaraan pribadi, yang di akibatkan oleh belum terintegrasinya antar sektor transportasi umum.

Sementara itu, isu-isu yang berkembang pada konteks regional, nasional maupun global adalah dikembangkannya sistem transportasi masa depan, konvensi bahan bakar fosik ke gas bahkan sudah mengarah ke sistem transportasi yang digerakkan dengan listrik dan memaksimalkan *inteligensia transport management* (manajemen transportasi yang cerdas) sehingga menyediakan layanan inovatif terkait moda transportasi dan manajemen lalu lintas yang berbeda.

Adapun beberapa isu yang mengemuka di bidang transportasi yang sampai dengan saat ini masih aktual adalah:

1. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Organisasi dan rincian tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri serta Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan perhubungan harus disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut;
2. Transportasi multi moda diperlukan untuk mengarah ke *seamless transport* (transportasi yang lancar);
3. Perlunya penataan transportasi perkotaan yang memiliki kondisi lingkungan udara yang sehat, peningkatan daya saing serta mendorong investasi;
4. Rendahnya penggunaan angkutan umum yang di indikasikan dengan tingginya kepemilikan kendaraan pribadi;
5. Perlunya pengembangan dan pemanfaatan transportasi massal berbasis jalan rel sebagai alternatif pergerakan orang dan barang.

Jika dikaitkan dengan persoalan yang dihadapi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, secara umum bidang transportasi yang terdiri dari transportasi darat, udara dan sungai dihadapkan pada permasalahan berupa rendahnya kualitas dan cakupan layanan. Hal ini dicirikan antara lain berupa:

1. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
2. Masih terbatasnya ketersediaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang memadai;
3. Belum optimalnya proses pengendalian dan pengamanan lalu lintas;
4. Kurangnya penyediaan angkutan massal dan jaringan jalan rel;
5. Belum optimalnya efektifitas pengaturan jaringan dan simpul pelayanan angkutan;

Permasalahan utama bidang perhubungan adalah (1) Belum berkembangnya sistem transportasi massal dan integrasi antar moda angkutan; (2) Masih rendahnya ketersediaan aksesibilitas moda transportasi, (3) Jumlah penumpang angkutan umum yang masih rendah, (4) Masih kurangnya fasilitas perlengkapan jalan dan masih tingginya overloading angkutan barang, (5) Belum adanya skylift truck untuk perbaikan lampu lalu lintas, (6) Belum adanya mobil uji keliling karena luasnya wilayah Kab. Kediri.

Jika dilihat dari dampak tugas dan fungsi Dinas Perhubungan terhadap capaian visi dan misi Kepala Daerah maka tugas dan fungsi Dinas Perhubungan mendukung visi dan misi Bupati ke.5, yaitu “Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah” sedangkan dampak terhadap capain program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Development Goals*) yaitu meningkatkan kinerja pelayanan publik bidang perhubungan dengan merencanakan program/kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja VISI/MISI Bupati maupun capaian program nasional.

Tantangan dan peluang dalam mewujudkan peningkatan kinerja pelayanan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Tantangan untuk mengoptimalkan pelyanan publik bidang perhubungan berbasis teknologi adalah adanya keterbatasan anggaran dan profesionalisme aparatur, sedangkan peluangnya masih adanya pemerataan dalam pendelegasian SDM dan budaya komunikasi yang luwes sehingga perencanaan per bidang saling terkait untuk mendukung satu tujuan.
2. Tantangan dalam mendukung pemerataan pembangunan perekonomian di Kabupaten Kediri yaitu penurunan aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan jasa transportasi, serta penambahan jumlah penduduk yang berbanding lurus dengan kebutuhan penggunaan transportasi sedangkan peluangnya masih tersedianya pelayanan ijin trayek dan survey load factor yang bisa menjadi dasar penentuan permintaan masyarakat terhdap angkutan.
3. Tantangan untuk mendukung mewujudkan ketertiban dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan yaitu belum memiliki jaringan trayek yang terpadu antar moda, intra moda ataupun multi moda dan semakin berkembangnya kemajuan daerah, sedangkan peluangnya tersedianya SPM pelayanan di UPTD PKB yang cukup memadai.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi kemajuan penyelenggaraan pembangunan dan pengembangan urusan pelayanan di sektor perhubungan. Berdasarkan realisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri pada periode sebelumnya dan isu-isu di tingkat nasional maupun propinsi maka ada beberapa isu penting (isu strategis) bidang perhubungan yaitu :

1. Peningkatan dan perluasan akses sarana dan sistem transportasi moda jalan meliputi:
  - a. Rencana pembangunan jalan bebas hambatan Kertosono-Kediri (jalan tol Kediri – Nganjuk) yang menghubungkan Kabupaten Kediri dengan Kabupaten Nganjuk;
  - b. Rencana pembangunan jalan terkait bandara Kediri;

- c. Jalan Tol Batu – Kediri;
  - d. Jalan Lingkar Wilis;
  - e. Rencana jalan lingkar Gampengrejo- Simpang Lima Gumul;
  - f. Akses menuju Bandara Kediri;
  - g. Akses transportasi terhadap tempat wisata;
2. Peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya aparatur bidang perhubungan secara komprehensif
  3. Peningkatan pengadaan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan tugas seperti kendaraan operasional teknis bidang perhubungan, alat komunikasi, senter lalu lintas, helm, jas hujan dll;
  4. Peningkatan kesadaran hukum masyarakat dalam hal tertib dan disiplin berlalu lintas mengingat saat ini kesadaran masyarakat untuk mentaati peraturan lalu lintas cenderung menurun.
  5. Pengarusutamaan gender dan perencanaan responsive gender masih dipandang kecil manfaatnya sehingga belum banyak program/kegiatan yang mengakomodir kepentingan tersebut.
  6. Peningkatan pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait sebagai upaya mewujudkan ketertiban dan keselamatan berlalu lintas;
  7. Masih rendahnya peranan angkutan umum di dalam memperlancar mobilitas penduduk dari satu tempat ke tempat lain karena rendahnya standar pelayanan angkutan umum dan semakin maraknya angkutan online;
  8. Peningkatan tindakan terhadap pengurangan emisi gas buang yang ditimbulkan dari asap kendaraan bermotor yang beroperasi di jalan raya guna menunjang program langit biru.
  9. Belum berkembangnya penyediaan sistem angkutan umum massal yang terpadu dan berkelanjutan, baik yang berbasis jalan maupun non jalan;
  10. Tingkat keselamatan lalu lintas jalan yang belum optimal;
  11. Rendahnya kapasitas ruas jalan dan tingginya hambatan samping di perkotaan;
  12. Belum termanfaatkannya teknologi informasi pada penyelenggaraan transportasi dengan optimal;
  13. Belum terwujudnya pengembangan dan pembangunan prasarana dan fasilitas transportasi udara;
  14. Perlunya peningkatan pengendalian dan penataan sistem transportasi.

Dari isu strategis tersebut di atas maka diperlukan strategi pembangunan sektor perhubungan dimana strategi tersebut merupakan rumusan dasar atau cara-cara yang perlu ditetapkan dengan memperhatikan lingkungan stratejik seperti kemampuan anggaran, potensi pengembangan sektor perhubungan, sumber daya aparatur dan dukungan stakeholders, maka dapat diketahui langkah

strategi dan kebijakan yang akan di ambil untuk pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan di wilayah Kabupaten Kediri.

Atas dasar pertimbangan tersebut maka strategi pembangunan dan pengembangan sektor perhubungan yang dilakukan Dinas Perhubungan Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penataan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota ;
2. Penataan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab./kota;
3. Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor;
4. Forum lalu lintas dan angkutan jalan Kab./Kota;
5. Pelaksanaan penyusunan rencana Induk Jaringan Induk LLAJ;
6. Pengendalian pelaksanaan rencana induk jaringan induk LLAJ Kabupaten/Kota
7. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan Kabupaten/Kota;
8. Rehabilitasi dan pemeliharaan perlengkapan jalan;
9. Koordinasi dan sinkronisasi penilaian Andalalin;
10. Penyediaan sarana prasarana Pengujian Kendaraan Bermotor;
11. Penyediaan bukti lulus uji pengujian kendaraan berkala kendaraan bermotor
12. Pemeliharaan sarana dan prasarana pengujian kendaraan bermotor
13. Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan berkala kendaraan bermotor
14. Pengendalian dan pengawasan ketersediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/ atau barang antar kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota;
15. Koordinasi dan sinkronisasi pengawasan pelaksanaan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir kewenangan Kabupaten/Kota.

#### **2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berikut ini beberapa hal penting dari Rancangan Awal RKPD yang menjadi landasan pembangunan kaitannya dengan rencana kerja Dinas Perhubungan, sebagai berikut:

- a. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri berdasarkan RPJPD Tahun 2005-2025:

Tema pembangunan Tahun 2022 berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025 adalah meningkatkan kualitas infrastruktur daerah yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Jika di kaitkan dengan Rencana Kerja Dinas Perhubungan mempunyai sasaran pokok yaitu meningkatkan pelayanan transportasi daerah yang aman, lancar dan terpadu, dengan arah kebijakan yaitu meningkatkan kelayakan dan keamanan penyelenggaraan transportasi, angkutan penumpang dan barang.

- b. Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Kediri Tahun 2022 berdasarkan rencana pembangunan daerah Tahun 2022:

Dalam rangka mengarahkan proses pembangunan Kabupaten Kediri pada Tahun 2022, maka penentuan prioritas pembangunan di dasarkan kepada hal-hal berikut:

1. Tujuan dan sasaran pembangunan dalam RPJMD yang diterjemahkan kedalam indikator sasaran agar dapat dicapai selama 5 tahun kedepan dari Tahun 2022-2026.

2. Program prioritas dalam RPJMD Tahun 2022-2026 sebagai penjabaran sasaran dan pencapaian indikator sasaran yang ingin dicapai.
3. Tema dan kebijakan pembangunan Tahun 2022 berdasarkan pada RPJMD Tahun 2022-2026 .
4. Permasalahan mendesak dan isu strategis pada Tahun 2022

Adapun prioritas pembangunan konektivitas di tahun 2022 berada pada misi peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar wilayah dengan rincian program prioritas sebagai berikut :

- a. Program strategis nasional (PSN) Jalan Tol Kertosono- Kediri-Tulungagung, jalan tol SUBAKRI (Sukorejo – Batu – Kediri), aksesibilitas Bandara Kediri;
- b. Jaringan jalur strategis antar wilayah, pusat, sub wilayah pengembangfan wilayah Kediri sekitarnya, meliputi:
  1. Selingkar Wilis Tulungagung-Nganjuk-Trenggalek-Ponorogo-MaDIUN-Kediri (Tunggal Rogo Mandiri);
  2. Jalan lereng Kelud (Kepung-Puncu-Plosoklaten-Ngancar);
  3. Jalan Surabaya-Jombang-Kediri-Blitar (melewati Pare dan Wates);
  4. Jalan Surabaya-Kediri-Blitar (melewati Kandat);
  5. Jalan Kediri-Nganjuk-Madiun;
  6. Jalan Malang-Kediri-Nganjuk-Madiun (melewati Papar);dan
  7. Jalan Kediri-Tulungagung-Trenggalek (melewati Mojo).
- c. Peningkatan jaringan jalan strategis antar Kecamatan, Antar Desa dan Desa dengan Ibukota Kecamatan.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat kami sampaikan hasil review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2022 terhadap rencana program kegiatan Dinas Perhubungan Tahun 2022 lebih di fokuskan kepada “ ***Pembangunan Infrastruktur Penunjang***”, sebagaimana dijelaskan dalam tabel 2.4 sebagai berikut:

**Tabel 2.4**  
**Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2022**  
**Kabupaten Kediri**

**Dinas Perhubungan**

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8.682.529.273</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100%</b>	<b>8.682.529.273</b>	
<b>01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>7.870.100</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>		<b>7.870.100</b>	<b>10 dokumen</b>	<b>8.687.200</b>	
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	3 dok	4.771.800	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	3 dok	4.771.800	
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tepat waktu	7 dok	3.098.300	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tepat waktu	7 dok	3.098.300	
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>7.408.479.918</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>7.408.479.918</b>	
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan penghasilan PNS	12 bulan	6.687.135.118	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan penghasilan PNS	12 bulan	6.687.135.118	
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	713.995.500	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	12 bulan	713.995.500	
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang t tepat waktu	8 dok	3.937.975	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	8 dok	3.937.975	
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen laporan	12 dok	3.411.325	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen laporan	12 dok	3.411.325	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
03	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>15.700.000</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>15.700.000</b>	
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	24 OB	15.700.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	24 OB	15.700.000	
05	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100.000.000</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>100.000.000</b>	
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pengadaan pakaian dinas	200 paket	100.000.000	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pengadaan pakaian dinas	200 paket	100.000.000	
06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>272.512.330</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>272.512.330</b>	
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	19.701.060	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	19.701.060	
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	55.049.520	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 bulan	55.049.520	
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	19.750.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	12 bulan	19.750.000	
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	10.330.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	12 bulan	10.330.500	
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	17.361.250	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	12 bulan	17.361.250	
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	12 bulan	4.800.000	
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan mamin Jumlah perjalanan dinas	6 kali keg 24 kali keg	141.920.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan mamin Jumlah perjalanan dinas	6 kali keg 24 kali keg	141.920.000	
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan jasa tenaga kearsipan	12 OB	3.600.000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	Jumlah pemenuhan jasa tenaga kearsipan	12 OB	3.600.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Cata tan Pent ing
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>17 unit</b>	<b>489.608.900</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>		<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>17 unit</b>	<b>489.608.900</b>	
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	336.718.900	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	15 unit	336.718.900	
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 paket	152.890.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah pengadaan gedung kantor	2 paket	152.890.000	
08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>144.130.000</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah</b>	<b>12 bulan</b>	<b>144.130.000</b>	
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	144.130.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wilayah Kab. Kediri	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 bulan	144.130.000	
09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>95 unit</b>	<b>244.228.025</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>		<b>Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>95 unit</b>	<b>244.228.025</b>	
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	29 unit	43.900.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	29 unit	43.900.000	
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	65 unit	39.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	65 unit	39.000.000	
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 paket	161.328.025	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah gedung kantor yang direhab	2 paket	161.328.025	
2	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		<b>Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan</b>	<b>20,00%</b>	<b>9.804.514.750</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>		<b>Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan</b>	<b>20,00%</b>	<b>9.804.514.750</b>	
			<b>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</b>	<b>11,37%</b>				<b>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</b>	<b>11,37%</b>		
			<b>Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ</b>	<b>86,25%</b>				<b>Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ</b>	<b>86,25%</b>		
			<b>Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan</b>	<b>97,00%</b>				<b>Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan</b>	<b>97,00%</b>		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>		<b>Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>205.000.000</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>		<b>Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ</b>	<b>1 dokumen</b>	<b>205.000.000</b>	
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen kajian	1 dok	205.000.000	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah dokumen kajian	1 dok	205.000.000	
<b>02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia</b>	<b>62 unit</b>	<b>2.450.590.130</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia</b>	<b>62 unit</b>	<b>2.450.590.130</b>	
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	62 unit	1.839.500.630	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	62 unit	1.839.500.630	
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	49 unit	611.089.500	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	49 unit	611.089.500	
<b>04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran</b>	<b>4 keg</b>	<b>3.163.420.350</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>		<b>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran</b>	<b>4 keg</b>	<b>3.163.420.350</b>	
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	4 keg	3.163.420.350	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	4 keg	3.163.420.350	
<b>05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB</b>	<b>5 unit</b>	<b>1.204.320.000</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>		<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB</b>	<b>5 unit</b>	<b>1.204.320.000</b>	
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah penyediaan sarpras PKB	3 unit	187.620.000	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah penyediaan sarpras PKB	3 unit	187.620.000	
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah ketersediaan kartu uji/smartcard	18750 set	465.500.000	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah ketersediaan kartu uji/smartcard	18750 set	465.500.000	
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	12 unit	426.800.000	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	12 unit	426.800.000	
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan monev pelayanan publik	2 keg	124.400.000	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan monev pelayanan publik	2 keg	124.400.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</b>	<b>10 keg</b>	<b>133.138.250</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</b>	<b>10 keg</b>	<b>133.138.250</b>	
06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN	5 keg	108.415.250	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN	5 keg	108.415.250	
06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan forum LLAJ	5 keg	24.723.000	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan forum LLAJ	5 keg	24.723.000	
07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>95%</b>	<b>26.870.000</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		<b>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>95%</b>	<b>26.870.000</b>	
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah persetujuan hasil ANDALALIN	5 keg	26.870.000	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah persetujuan hasil ANDALALIN	5 keg	26.870.000	
08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas &amp; Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan</b>	<b>15 keg</b>	<b>2.218.666.000</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>		<b>Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas &amp; Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan</b>	<b>15 keg</b>	<b>2.218.666.000</b>	
08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	15 keg	2.218.666.000	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	15 keg	2.218.666.000	
09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang</b>	<b>45 kali keg</b>	<b>402.510.000</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>		<b>Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang</b>	<b>45 kali keg</b>	<b>402.510.000</b>	
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	45 kali keg	402.510.000	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Wilayah Kabupaten Kediri	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	45 kali keg	402.510.000	
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>18.487.044.003</b>						<b>18.487.044.003</b>

Adapun rincian usulan dari para pemangku kepentingan terkait urusan bidang perhubungan dapat dijelaskan sebagaimana tabel 2.5 berikut ini :

Tabel 2.5

**Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2022  
Kabupaten Kediri**

**DINAS PERHUBUNGAN**

No.	Program/ Kegiatan	Jenis	Lokasi	Volume	Total Vol.
1	2	3	4	5	6
02	<b>Program Penyelenggaraan LLAJ</b>				
2.02	Kegiatan Program Penyelenggaraan LLAJ				
2.02.02	Sub Kegiatan:				
	Penyediaan perlengkapan jalan di Jalan Kab./Kota	Warning Light	Simp.3 Dsn Bajang Desa	1 unit	5 unit
			Simp.3 Timur Puskesmas Semen	1 unit	
			Simp.3 Timur Pasar Semen	1 unit	
			Simp.3 Desa Sumberjo Kec.Purwoasri	1 unit	
			Simp 4 Dsn. Bangi Desa Wowomarto Kec. Purwoasri	1 unit	
		Pengecatan Marka	Marka Parkir Kec. Pare	1.000 m'	4 ruas
			Jl. Brawijaya Pare	1.500m'	
			Jl. Argo Wilis Psr.Semen baras Ds. Kedak	1.250 m'	
			Dsn Ngancar Ds. Sugihwaras	1.750 m'	
		Rambu konvensional	Jl. Kediri - Mojo	24 unit	24 unit
		RPPJ	Simp 3 SMPN 2 Kandangan	1 unit	4 unit
			Simp 3 Ds. Medowo Ke Tanggulasi	1 unit	
			Simp 3 Dsn. Sidorejo-Ringinagung Ds Medowo	1 unit	
			Simp. 3 Dsn. Singkil Ds. Medowo	1 unit	
		APILL terkoordinasi /ATCS	Simp 4 Bogo	1 paket	2 paket
			Simp. 4 Masjid An Nur Pare	1 paket	
		Guardrail/pagar pengaman Jalan	Jembatan Ds.Padangan Kec. KayenKidul	6 beam	6 beam

No.	Program/ Kegiatan	Jenis	Lokasi	Volume	Total Vol.
1	2	3	4	5	6
2.02.04	Sub Kegiatan:				
	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	RPPJ	Kawasan SLG	4 unit	4 unit
		Rambu Standart	Kawasan SLG	2 unit	17 unit
			Simp 4. Doko	2 unit	
			Jl. SLG Pesantren	4 unit	
			Jl depan Kec. Pare	2 unit	
			Ruas jl. Mojo Ds. Sidomulyo Kec. Semen	4 unit	
			Simp. 3 Gogorante	3 unit	
			APILL	TL Simp.3 Ngadiluwih	
		FA simp 4 Balai Ds Wates		1 unit	
		FA simp 3 gadungan Kec.Puncu		1 unit	
		FA. Depan Ponpes Al Falah Putri		1 unit	
		FA Simp.3 SMK Kertonegoro Wates		1 unit	
		FA Simp 3 Ds. Sonorejo Kec.Grogol		1 unit	
		FA simp 3 Wates Blabak		1 unit	
		FA simp 4 Ds. Cendono Kec.Kandat		1 unit	
		FA simp 4 Ngancar		1 unit	
		FA simp 4 Deyeng Ringinrejo		1 unit	
		FA simp 3 Klodran Semen		1 unit	
		FA simp 4 Jabang Kras		1 unit	
		FA simp 4 Bedrek Grogol		1 unit	
		Rambu Elektronik	Simp 3 Sumberoyo Purwoasri	2 paket	5 paket
			Simp 4 titik Semen	2 paket	
			Simp 3 Mojo	1 paket	
		Pemeliharaan CCTV	Simp 3 Tepus	2 unit	8 Unit
			Simp 4 Katang	2 unit	
			Simp 4 Paron	2 unit	
			Kawasan SLG	2 unit	

**2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat:**

Ada beberapa usulan program dan kegiatan dari masyarakat melalui mekanisme MUSRENBANG kecamatan dalam forum SKPD. Usulan masyarakat tersebut ditujukan pada Program Pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan dan di realisasikan dalam kegiatan pengadaan dan perlengkapan jalan Tahun 2022.

Tidak semua usulan kegiatan dari masyarakat di akomodir dalam rencana usulan APBD Tahun 2022, mengingat keterbatasan APBD dalam mendukung kegiatan se-Kabupaten Kediri karena itu sebagian usulan kegiatan dari masyarakat ini di seleksi sesuai prioritas dan kewenangan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, apabila masih merupakan kewenangan Pemerintah Kabupaten Kediri akan di usulkan pada tahun berikutnya yang disesuaikan dengan anggaran yang ada. Jika usulan dari masyarakat termasuk kewenangan Provinsi di usulkan ke tingkat Provinsi dengan sumber pendanaan dari anggaran APBD Provinsi, demikian juga jika usulan tersebut merupakan kewenangan Kementrian Perhubungan maka akan di usulkan ke Kementrian Perhubungan Darat dengan sumber pendanaan dari anggaran APBN.

### BAB III

#### TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Bab ini memuat telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran renja Dinas Perhubungan pada tahun yang direncanakan (2022), serta rekapitulasi program dan kegiatan prakiraan maju Tahun 2023.

#### 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan. Kebijakan nasional terkait urusan Perhubungan dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan Republik Indonesia sebagaimana dalam tabel berikut ini :

**Tabel 3.1**  
**Identifikasi Kebijakan Nasional**

No.	Kebijakan Nasional	Sumber
A.	<b>Keselamatan dan Keamanan</b>	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran menurunnya angka kecelakaan transportasi dengan arah kebijakan meningkatkan keselamatan dalam penyelenggaraan transportasi	
	2. Sasaran menurunnya Jumlah gangguan keamanan dalam penyelenggaraan transportasi	
B.	<b>Pelayanan Transportasi</b>	Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024
	1. Sasaran meningkatnya kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi, dengan arah kebijakan meningkatkan kinerja pelayanan sarana dan prasarana transportasi	
	2. Sasaran terpenuhinya SDM transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan memenuhi sdm transportasi dalam Jumlah dan kompetensi sesuai dengan kebutuhan	
	3. Sasaran meningkatnya kualitas penelitian sesuai dengan kebutuhan, dengan arah kebijakan meningkatkan kualitas penelitian transportasi	
	4. Sasaran meningkatnya kinerja capaian dalam mewujudkan <i>good governance</i> , dengan arah kebijakan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kinerja	

	<p>5. Sasaran meningkatnya penetapan regulasi dalam implementasi kebijakan bidang perhubungan, dengan arah kebijakan meningkatkan kuantitas dan kualitas penetapan dan implementasi regulasi sektor transportasi</p>	
	<p>6. Sasaran menurunnya emisi gas rumah kaca (GRK) dan meningkatnya penerapan teknologi ramah lingkungan pada sektor transportasi, dengan arah kebijakan menerapkan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan</p>	
	<p>7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja pengawasan dalam rangka mewujudkan <i>clean governance</i>, dengan arah kebijakan pelaksanaan pengawasan intern yang berintegritas, profesional dan amanah</p>	
<p>C.</p>	<p><b>Kapasitas Transportasi</b></p> <p>1. Sasaran meningkatnya kapasitas sarana dan prasarana transportasi dan keterpaduan sistem transportasi antarmoda dan multimoda, dengan arah kebijakan meningkatkan kapasitas, konektivitas/aksesibilitas antar wilayah dan keterpaduan antarmoda/multimoda,</p> <p>2. Sasaran meningkatnya layanan transportasi di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia, dengan arah kebijakan meningkatkan pengembangan sarana dan prasarana di daerah rawan bencana, perbatasan, terluar, terpencil dan khususnya di wilayah timur Indonesia</p> <p>3. Sasaran Meningkatnya pelayanan angkutan umum massal perkotaan, dengan arah kebijakan mengembangkan sistem angkutan umum massal dengan orientasi kepada angkutan bus maupun rel dengan fasilitas alih modal terpadu</p> <p>4. Sasaran meningkatnya aplikasi teknologi informasi dan skema sistem manajemen transportasi perkotaan, dengan arah kebijakan meningkatkan aplikasi teknologi informasi dalam sistem manajemen perkotaan</p>	<p>Rencana Strategis Kemenhub 2020 - 2024</p>

Kebijakan nasional tersebut perlu ditelaah untuk menentukan kebijakan bidang perhubungan di level pemerintah Kabupaten. Telaah tersebut dimaksudkan untuk mensinergikan Kebijakan bidang perhubungan antara pusat dengan daerah sehingga berjalan selaras, efektif, dan efisien.

Kementrian Perhubungan menetapkan lima program prioritas yakni *pembangunan konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah terpencil, perbatasan*

dan kepulauan, Ibu Kota Negara Baru serta pengembangan SDM. Penyusunan RKPD Kabupaten/Kota perlu melakukan telaahan atas kebijakan provinsi. Tahap ini menguraikan kebijakan provinsi berupa arah kebijakan dan fokus pembangunan di wilayah provinsi. Kesemuanya itu tertuang dalam RPJMD Provinsi maupun yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi (rancangan awal) dan penelaahan pengaruhnya terhadap penyusunan RKPD Kabupaten/ Kota yang direncanakan. Kelima program Nasional/Provinsi tersebut telah diakomodir ke dalam program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perhubungan**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Perhubungan. Dengan demikian, tujuan dan sasaran pada Renja Dinas Perhubungan mengacu pada tujuan dan sasaran Renstra Dinas Perhubungan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

#### **3.2.1 Tujuan**

1. Meningkatkan profesionalisme SDM bidang perhubungan dan meningkatkan sikap interdependensi (saling ketergantungan) untuk mewujudkan sinergisitas dalam melaksanakan TUPOKSI bidang perhubungan
2. Mewujudkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan Sumber Daya yang ada serta meningkatkan kapasitas kelembagaan Dinas Perhubungan
3. Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan jasa perhubungan secara adil dan merata dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan
4. Mewujudkan kapasitas dan kualitas pelayanan jasa perhubungan yang handal, ramah lingkungan, dan dilengkapi dengan penggunaan teknologi informasi bidang transportasi untuk menunjang kinerja pelayanan.

#### **3.2.2 Sasaran**

1. Terwujudnya SDM perhubungan yang berkompetensi, bermoral, disiplin, memiliki dedikasi tinggi, dan bersinergis;
2. Terwujudnya efektivitas dan efisiensi pengelolaan sumber daya Perhubungan dan berjalannya reformasi kelembagaan secara berkala;
3. Terwujudnya pelayanan jasa perhubungan ke daerah-daerah sentra produksi pertanian dan industri, daerah wisata, daerah terpencil, dan meningkatnya keselamatan pengguna jalan melalui pemahaman tertib berlalulintas;
4. Terwujudnya sarana dan prasarana perhubungan, diterapkannya analisis dampak lingkungan dalam perencanaan transportasi, dan terlaksananya penerapan teknologi informasi dalam menunjang kinerja pelayanan jasa perhubungan.

### 3.3 Rekapitulasi Program dan Kegiatan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2022

Penyusunan program dan kegiatan yang tercantum dalam rencana kerja tahun 2022 dalam proses pembuatannya memperhatikan beberapa faktor yaitu;

(1) Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah,

Program Kegiatan Dinas Perhubungan mendukung visi Bupati “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Kediri yang Maju, Berkarakter Nasionalis-Religius, sera Sejahtera Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan yang di dukung birokrasi yang melayani” dan misi nomor 5 yaitu :”Peningkatan infrastruktur dan konektivitas antar - wilayah”, dimana bidang perhubungan bertujuan untuk meningkatkan kelancaran dan keamanan transportasi serta memenuhi kebutuhan sarana prasarana lalu lintas angkutan jalan di wilayah Kabupaten Kediri.

(2) Pencapaian Standar Pelayanan Minimal,

Standar Pelayanan Minimal pada dinas perhubungan setiap tahun dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi dengan melaksanakan survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang bertujuan untuk peningkatan dan pengembangan pelayanan publik bidang perhubungan.

(3) Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, dan

Guna mendukung potensi ekonomi daerah, Dinas Perhubungan membantu ketertiban , kelancaran dan keselamatan transportasi atau pengguna jalan melalui kegiatan Pengadaan Perlengkapan Jalan dan Operasional Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan

(4) Peningkatan pelayanan publik berbasis IT

Upaya Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri dalam meningkatkan pelayanan publik berbasis IT bidang perhubungan yaitu dengan melaksanakan pengembangan sistem informasi bidang perhubungan berbasis IT yang dirintis dengan mengoptimalkan pengembangan E-Dishub dan SIM PKB serta peningkatan operasional ATCS.

Berdasarkan pada kebijakan Pemerintah Daerah dan adanya penyesuaian terhadap penyederhanaan program/kegiatan Tahun Anggaran 2022, maka Jumlah alokasi pagu anggaran pada RENJA Tahun 2022 yaitu sebesar Rp. 18.487.044.003,-, sebagaimana terinci dalam tabel 3.2 berikut ini:

**Tabel 3.2**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2022**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2023**  
**Kabupaten Kediri**

Kode Rek	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I	Program Penunjang Usuran Pemerintahan Daerah	Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Usuran Pemerintahan Daerah		100%	8.682.529.273	APBD		100%	8.682.529.273
01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu		10 dokumen	7.870.100	APBD		10 dokumen	7.870.100
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	Wilayah Kabupaten Kediri	3 dok	4.771.800	APBD		3 dok	4.771.800
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tepat waktu	Wilayah Kabupaten Kediri	7 dok	3.098.300	APBD		7 dok	3.098.300
02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah		12 bulan	7.408.479.918	APBD		12 bulan	7.408.479.918
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan penghasilan PNS	Wilayah Kabupaten Kediri	12 bulan	6.687.135.118	APBD		12 bulan	6.687.135.118
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	713.995.500	APBD		12 bulan	713.995.500
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang tepat waktu	Wilayah Kabupaten Kediri	8 dok	3.937.975	APBD		8 dok	3.937.975
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan yang tepat waktu	Wilayah Kabupaten Kediri	12 dok	3.411.325	APBD		12 dok	3.411.325
03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah		12 bulan	15.700.000	APBD		12 bulan	15.700.000
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	24 OB	15.700.000	APBD		24 OB	15.700.000
05	Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah		12 bulan	100.000.000	APBD		12 bulan	100.000.000
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	200 paket	100.000.000	APBD		200 paket	100.000.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</b>		12 bulan	272.512.330	APBD		12 bulan	272.512.330
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	19.701.060	APBD		12 bulan	19.701.060
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	55.049.520	APBD		12 bulan	55.049.520
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	19.750.000	APBD		12 bulan	19.750.000
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	10.330.500	APBD		12 bulan	10.330.500
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	17.361.250	APBD		12 bulan	17.361.250
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 bulan	4.800.000	APBD		12 bulan	4.800.000
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan mamin perjalanan dinas	Wilayah Kabupaten Kediri	6 kali keg 24 kali keg	141.920.000	APBD		6 kali keg 24 kali keg	141.920.000
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pemenuhan jasa tenaga kearsipan	Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri	12 OB	3.600.000	APBD		12 OB	3.600.000
07	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>		17 unit	489.608.900	APBD		17 unit	489.608.900
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Wilayah Kab. Kediri	15 unit	336.718.900	APBD		15 unit	336.718.900
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	Wilayah Kab. Kediri	2 paket	152.890.000	APBD		2 paket	152.890.000
08	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah</b>		12 bulan	144.130.000	APBD		12 bulan	144.130.000
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Wilayah Kab. Kediri	12 bulan	144.130.000	APBD		12 bulan	144.130.000
09	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>		95 unit	244.228.025	APBD		95 unit	244.228.025
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipeliharaan	Wilayah Kabupaten Kediri	29 unit	43.900.000	APBD		29 unit	43.900.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	65 unit	39.000.000	APBD		65 unit	39.000.000
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	Wilayah Kabupaten Kediri	2 paket	161.328.025	APBD		2 paket	161.328.025
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan</b>		<b>20,00%</b>	<b>9.804.514.730</b>	APBD		<b>20,00%</b>	<b>9.804.514.730</b>
		<b>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</b>		<b>11,37%</b>				<b>11,37%</b>	
		<b>Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ</b>		<b>86,25%</b>				<b>86,25%</b>	
		<b>Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan</b>		<b>97,00%</b>				<b>97,00%</b>	
<b>01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>	<b>Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ</b>		<b>1 dokumen</b>	<b>205.000.000</b>	APBD		<b>1 dokumen</b>	<b>205.000.000</b>
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen kajian	Wilayah Kabupaten Kediri	1 dok	205.000.000	APBD		1 dok	205.000.000
<b>02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia</b>		<b>59 unit</b>	<b>2.450.590.130</b>	APBD		<b>59 unit</b>	<b>2.450.590.130</b>
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	Wilayah Kabupaten Kediri	59 unit	1.839.500.630	APBD		59 unit	1.839.500.630
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	Wilayah Kabupaten Kediri	49 unit	611.089.500	APBD		49 unit	611.089.500
<b>04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran</b>		<b>4 keg</b>	<b>3.163.420.350</b>	APBD		<b>4 keg</b>	<b>3.163.420.350</b>
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	Wilayah Kabupaten Kediri	4 keg	3.163.420.350	APBD		4 keg	3.163.420.350
<b>05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB</b>		<b>5 unit</b>	<b>1.204.320.000</b>	APBD		<b>5 unit</b>	<b>1.204.320.000</b>
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarpras PKB	Wilayah Kabupaten Kediri	3 unit	187.620.000	APBD		3 unit	187.620.000
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ketersediaan kartu uji/smartcard	Wilayah Kabupaten Kediri	18750 set	465.500.000	APBD		18750 set	465.500.000
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	Wilayah Kabupaten Kediri	12 unit	426.800.000	APBD		12 unit	426.800.000
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan monev pelayanan publik	Wilayah Kabupaten Kediri	2 keg	124.400.000	APBD		2 keg	124.400.000

Kode Rek	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2021				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2022	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
06	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</b>		10 keg	133.138.250	APBD		10 keg	133.138.250
06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN	Wilayah Kabupaten Kediri	5 keg	108.415.250	APBD		5 keg	108.415.250
06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum LLAJ	Wilayah Kabupaten Kediri	5 keg	24.723.000	APBD		5 keg	24.723.000
07	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>		95%	26.870.000	APBD		95%	26.870.000
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah persetujuan hasil ANDALALIN	Wilayah Kabupaten Kediri	5 keg	26.870.000	APBD		5 keg	26.870.000
08	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas &amp; Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan</b>		15 keg	2.218.666.000	APBD		15 keg	2.218.666.000
08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	Wilayah Kabupaten Kediri	15 keg	2.218.666.000	APBD		15 keg	2.218.666.000
09	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang</b>		45 kali keg	402.510.000	APBD		45 kali keg	402.510.000
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	Wilayah Kabupaten Kediri	45 kali keg	402.510.000	APBD		45 kali keg	402.510.000
<b>TOTAL ANGGARAN</b>					<b>18.487.044.003</b>				<b>18.487.044.003</b>

Perencanaan program dan kerja Dinas Perhubungan di Tahun 2022 ditetapkan berdasarkan pertimbangan hasil evaluasi di tahun sebelumnya dan disesuaikan dengan usulan masyarakat ataupun perkembangan tuntutan teknologi dan informasi di sektor transportasi. Tahun 2022 jumlah program ada 2 (dua) program yang terinci dalam 16 kegiatan dan 35 sub kegiatan. Penyebaran program terkait sarana dan prasarana lalu lintas meliputi wilayah se-Kabupaten Kediri, disamping itu juga tersebar di desa / kecamatan yang telah dilakukan kajian awal perencanaan kebutuhan sarana prasarana lalu lintas. Hal ini dapat dilihat dari rekapitulasi pengadaan perlengkapan jalan mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2020, sebagaimana terlihat dalam tabel 3.3.

**Tabel 3.3**  
**Rekapitulasi Perlengkapan Jalan Tahun 2016 - 2020**

NO	INDIKATOR	TAHUN					TOTAL
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	Rambu-rambu lalu lintas	363	13	10	23	27	436 unit
2	Guardrail	34	14	0	0	0	48 beam
3	APILL	19	5	0	6	2	32 unit
4	Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ)	39	15	0	8	7	69 unit
5	Cermin Tikungan		9				9 unit
6	Marka	17.735,3	3.219	2.873,84	6.737,67	9.730	40.295,51 unit
7	Traffic Cone			20			20 unit
8	Deliniator	489	193				682 buah
9	Paku jalan bulat	600					600 buah
10	Road Barrier					16	16 buah
11	Concret Barrier				16		16 buah
12	Pengadaan CCTV/ Monopole		22				22 unit
13	Pengadaan ZOSS		6				6 m'
14	Zebra Cross		1.926				1.926 m'
15	Rambu Elektronik				4		4 unit
16	Pengadaan PCTL				1		1 unit

## BAB IV

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana kerja dan pendanaan SKPD merupakan dokumen yang menjelaskan terkait program / kegiatan dan pendanaan SKPD dalam satu tahun anggaran. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi SKPD selama satu tahun. Kegiatan SKPD adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh SKPD untuk menghasilkan keluaran (output) dalam rangka mencapai hasil (outcome) suatu program.

Rencana program dan kegiatan prioritas Dinas Perhubungan Tahun 2022 berisi program dan kegiatan prioritas guna mencapai secara langsung sasaran pembangunan untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan bidang perhubungan jangka menengah maupun untuk penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai kewenangan daerah. Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah Jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program dan kegiatan prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan acuan bagi SKPD.

Pelaksanaan rencana kerja berupa program/kegiatan Dinas Perhubungan sebagai instrument pelaksanaan dari program Tahun 2022 yang harus dilaksanakan secara efisien dan efektif sehingga diperlukan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang telah diprogramkan serta dilakukan dengan memanfaatkan forum perencanaan, rapat koordinasi dan penjangkaran aspirasi masyarakat sehingga tercapai sinergi dalam pelaksanaannya dengan tetap menerapkan prinsip-prinsip safe guarding yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, monitoring dan evaluasi.

Efektifitas pelaksanaan program perlu dijaga dengan melakukan monitoring dan evaluasi pada setiap tahapan agar diperoleh hasil maksimal serta sebagai umpan balik bagi perencanaan tahap berikutnya. Adapun rencana kerja berdasarkan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 dapat dijelaskan sebagaimana table 4.1 berikut :

**TABEL 4.1**  
**RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD TAHUN 2022**

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase pemenuhan Penunjang kebutuhan Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>8.682.529.273</b>	APBD
<b>01</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang tepat waktu</b>	<b>7.870.100</b>	APBD
01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tepat waktu	4.771.800	APBD
01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kinerja yang tepat waktu	3.098.300	APBD
<b>02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi keuangan perangkat daerah</b>	<b>7.408.479.918</b>	APBD
02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah pemenuhan penyediaan gaji dan tunjangan penghasilan PNS	6.687.135.118	APBD
02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah pemenuhan administrasi pelaksanaan tugas ASN	713.995.500	APBD
02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun yang t epat waktu	3.937.975	APBD
02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan yang tepat waktu	3.411.325	APBD
<b>03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi barang milik daerah</b>	<b>15.700.000</b>	APBD
03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah penerimaan honor jasa pengelola barang	15.700.000	APBD
<b>05</b>	<b>Administrasi kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>100.000.000</b>	APBD
05.02	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah pengadaan pakaian dinas	100.000.000	APBD
<b>06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan kepegawaian perangkat daerah</b>	<b>272.512.330</b>	APBD
06.01	Penyediaan komponen instansi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan komponen instansi listrik/ penerangan bangunan kantor	19.701.060	APBD
06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	55.049.520	APBD
06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah pemenuhan penyediaan peralatan rumah tangga	19.750.000	APBD
06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pemenuhan penyediaan bahan logistik kantor	10.330.500	APBD
06.05	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah pemenuhan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	17.361.250	APBD
06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah pemenuhan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	4.800.000	APBD
06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah kegiatan mamin Jumlah perjalanan dinas	141.920.000	APBD
06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah pemenuhan jasa tenaga kearsipan	3.600.000	APBD
<b>07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah</b>	<b>489.608.900</b>	APBD
07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	336.718.900	APBD
07.11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah pengadaan gedung kantor	152.890.000	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
<b>08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan jasa pendukung urusan pemerintah daerah</b>	<b>144.130.000</b>	APBD
08.02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pemenuhan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	144.130.000	APBD
<b>09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Jumlah pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah</b>	<b>244.228.025</b>	APBD
09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara	43.900.000	APBD
09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	39.000.000	APBD
09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang direhab	161.328.025	APBD
<b>2</b>	<b>Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan</b>	<b>Persentase ketersediaan kajian penyelenggaraan dan pengembangan bidang perhubungan</b>	<b>9.804.514.730</b>	APBD
		<b>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</b>		
		<b>Persentase peningkatan ketertiban dan keselamatan LLAJ</b>		
		<b>Persentase angkutan jalan yang memenuhi standart keselamatan</b>		
<b>01</b>	<b>Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kab/Kota</b>	<b>Jumlah hasil kajian rencana induk jaringan LLAJ</b>	<b>205.000.000</b>	APBD
01.01	Pelaksanaan penyusunan rencana induk jaringan LLAJ Kab/Kota	Jumlah dokumen kajian	205.000.000	APBD
<b>02</b>	<b>Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah perlengkapan jalan yang tersedia</b>	<b>2.450.590.130</b>	APBD
02.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten	1.839.500.630	APBD
02.04	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten yang dipelihara	611.089.500	APBD
<b>04</b>	<b>Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir</b>	<b>Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran</b>	<b>3.163.420.350</b>	APBD
04.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi perparkiran	3.163.420.350	APBD
<b>05</b>	<b>Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</b>	<b>Jumlah pemenuhan kebutuhan PKB</b>	<b>1.204.320.000</b>	APBD
05.01	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah penyediaan sarpras PKB	187.620.000	APBD
05.04	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah ketersediaan kartu uji/smartcard	465.500.000	APBD
05.07	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah sarana dan prasarana PKB yang dipelihara / direhab	426.800.000	APBD
05.10	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah kegiatan movev pelayanan publik	124.400.000	APBD
<b>06</b>	<b>Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pelaksanaan manajemen rekayasa lalu lintas</b>	<b>133.138.250</b>	APBD
06.01	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengumpulan data untuk persyaratan penilaian WTN	108.415.250	APBD
06.05	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan forum LLAJ	24.723.000	APBD
<b>07</b>	<b>Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>Prosentase Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota</b>	<b>26.870.000</b>	APBD

NO.	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG	SUMBER DANA
1	2	3	4	5
07.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	Jumlah persetujuan hasil ANDALALIN	26.870.000	APBD
<b>08</b>	<b>Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan</b>	<b>Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas &amp; Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan</b>	<b>2.218.666.000</b>	APBD
08.02	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Kegiatan Penertiban Lalu Lintas & Pengendalian Lalu Lintas yang dilaksanakan	2.218.666.000	APBD
<b>09</b>	<b>Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan pelayanan angkutan orang/barang</b>	<b>402.510.000</b>	APBD
09.02	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan angkutan orang/barang	402.510.000	APBD
<b>TOTAL ANGGARAN</b>			<b>18.487.044.003</b>	

Sehubungan dengan adanya fungsi sebagai dinas penghasil maka Dinas Perhubungan merencanakan penerimaan pendapatan asli daerah bidang perhubungan sebagaimana tabel 4.2 berikut:

**Tabel 4.2**

**RENCANA PENERIMAAN PAD DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI  
TAHUN 2022**

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN SKPD							KET.	
Kode Rekening	Uraian				Volume	Satuan		Tarif/Harga
1	2				3	4	5	6 (3 x 5)
<b>4</b>								<b>13.373.850.650</b>
<b>4</b>	<b>1</b>							<b>13.373.850.650</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>						
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>					<b>13.326.945.000</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>19</b>				<b>10.683.005.000</b>
					76.264	kend	500	38.132.000
					30.540	kend	1.000	30.540.000
					7.164	kend	2.000	14.328.000
					570.289	kend	15.000	8.554.335.000
					68.189	kend	30.000	2.045.670.000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>01</b>	<b>45</b>				<b>2.643.940.000</b>
					12.575	kend/o	95.000	1.194.625.000
					12.425	kend/o	105.000	1.304.625.000
					106	kend/o	115.000	12.190.000
					12650	kend/o	10.000	126.500.000
					60	kend/o	100.000	6.000.000
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02</b>					<b>46.905.650</b>
<b>4</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>02</b>	<b>01</b>				<b>7.510.650</b>
								7.510.650
					1	thn		

RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN SKPD							Ket.			
Kode Rekening					Uraian	Volume		Satuan	Tarif/ Harga	Jumlah
1					2	3	4	5	6	7
4	1	2	02	14	<b>Retribusi Terminal - Tempat Kegiatan Usaha</b>				<b>3.832.500</b>	
					Ret. sewa kios di terminal Pare				3.832.500	
4	1	2	02	24	<b>Retribusi Penyeberangan orang</b>				<b>35.562.500</b>	
					- Ret. sewa kios di terminal Pare	1	thn		3.832.500	
					- Ret. Penyeberangan di air (orang)	16.435	org	500	8.217.500	
					- Ret. Penyeberangan di air (barang)	27.345	org	1.000	27.345.000	
4	1	2	03		<b>Retribusi Perizinan tertentu</b>				<b>0</b>	
4	1	2	03	04	Retribusi Izin trayek					
					- Ijin trayek angkutan pedesaan	0	kl/kend	21.000	0	
					- Ijin trayek angkutan perbatasan	0	kl/kend	21.000	0	
					- Ijin trayek Angkutan antar kota	0	kl/kend	15.000	0	

## BAB V

### PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 telah diuraikan hasil pembangunan urusan pemerintahan bidang perhubungan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2022. Pelaksanaan mekanisme pengamanan program dapat dilakukan melalui prinsip *safeguarding* (tindak pengamanan) melalui penerapan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan partisipasi/peran serta masyarakat luas untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Prinsip transparansi diwujudkan dalam bentuk kegiatan penyebaran informasi, prinsip akuntabilitas diwujudkan melalui pembentukan unit pengaduan masyarakat dan prinsip partisipasi dioperasionalkan melalui penyelenggaraan forum lintas pelaku (pemerintah dan masyarakat) guna mendukung pencapaian pembangunan daerah yang lebih luas, sehingga diperlukan produk kebijakan atau peraturan perundangan yang khusus di buat untuk mendukung *safeguarding*.

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri Tahun 2022 ini merupakan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2022. Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2022 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perhubungan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien serta disesuaikan rencana realisasi anggaran yang sudah ditetapkan.

Kediri,            -            -            2021

**KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN KEDIRI**



**BUPATI KEDIRI,**

**HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA**

